

# Tambahan Penerimaan Bisa Rp 660 Triliun

Tambahan penerimaan untuk membiayai program-program utama pemerintah, seperti makan gratis bergizi dan pembangunan rumah sebanyak 3 juta per tahun.

**JAKARTA, KOMPAS** — Peran aktif ekonomi Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djajidjodikasumo, mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp 660 triliun. Tambahan anggaran tersebut berasal dari penguatan fiskal melalui pengurangan beban, penajaman kredit, dan aktivitas ekonomi di internet.

Menurut Hashim, tambahan anggaran ini untuk membiayai belanja negara, termasuk dua program utama, yakni makan gratis bergizi dan pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit per tahun atau 15 juta unit, dalam 5 tahun periode pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Hashim dalam acara Dialog Ekonomi dalam acara Dialog Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Meranti Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Selain Hashim, pembicara lainnya adalah pengusaha Chairul Tanjung dan Ke-

tuha Umam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi ini masyarakat nasional luar biasa (manusab), Anindya Novyan Bakrie.

"Ada kabar gembira karena kami sudah menemukan sumber dana tambahan untuk anggaran negara," ujarnya.

Ia menambahkan, ada laporan dari kajian yang menyebutkan, penajaman kredit, dan aktivitas ekonomi di internet.

Menurut Hashim, kredit kar-

bon ini bisa dijual 10 dollar AS per ton. Dengan demikian, ada potensi pendapatan negara sebesar 577 juta ton. Ini bisa ditawarkan untuk dijual ke negara-negara penghasil emisi besar, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Menurut Hashim, kredit karbon ini bisa dijual 10 dollar AS per ton. Dengan demikian, ada potensi pendapatan negara sebesar 577 juta ton. Ini bisa ditawarkan untuk dijual ke negara-negara penghasil emisi besar, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Menurut perhitungan timnya, negara akan mendapatkan tambahan anggaran dari penguatan aktivitas internet yang legal, semipal, dan penguatan yang ada. Adanya inilah bisa mencapai Rp 300 triliun setiap tahun. Ini pun belum masuk dalam anggaran APBN.

"Dengan demikian, akan ada tambahan dana yang bisa diinjeksikan ke APBN sebesar Rp 440 triliun-Rp 660 triliun, atau

setara 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara kita yang sekitar Rp 22.000 triliun," kata Hashim.

**Belanja program**

Hashim menyampaikan, tambahan dana itu untuk membiayai berbagai belanja negara dan dua program utama Prabowo, yakni makan bergizi dan pembangunan rumah 3 juta unit per tahun.

Program makan bergizi bertujuan untuk memperbaiki anak-anak yang kurang gizi atau stunting. Ini agar ke depan anak-anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di dunia global.

Program pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit per tahun atau 15 juta unit dalam lima tahun ke depan, lanjut Hashim, bertujuan tak hanya memberikan kebutuhan hunian bagi masyarakat, tetapi juga untuk menggerakkan perke-

konomian pendapatan negara setidaknya pada triwulan kedua atau triwulan ketiga tahun depan.

Selain memungut pajak dari pengusaha nakal dan mendapat tambahan dana dari penjualan kredit karbon, Hashim mengatakan, ada satu cara lagi menambah pendapatan negara. Menurut dia, Wakil Menteri Keuangan Anggito Alimanyu mengupayakan peninjauan anggaran negara dari pengawasan dan pemantauan aktivitas internet.

Menurut perhitungan timnya, negara akan mendapatkan tambahan anggaran dari penguatan aktivitas internet yang legal, semipal, dan penguatan yang ada. Adanya inilah bisa mencapai Rp 300 triliun setiap tahun. Ini pun belum masuk dalam anggaran APBN.

"Dengan demikian, akan ada tambahan dana yang bisa diinjeksikan ke APBN sebesar Rp 440 triliun-Rp 660 triliun, atau

setara 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara kita yang sekitar Rp 22.000 triliun," kata Hashim.

**Belanja program**

Hashim menyampaikan, tambahan dana itu untuk membiayai berbagai belanja negara dan dua program utama Prabowo, yakni makan bergizi dan pembangunan rumah 3 juta unit per tahun.

Program makan bergizi bertujuan untuk memperbaiki anak-anak yang kurang gizi atau stunting. Ini agar ke depan anak-anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di dunia global.

Program pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit per tahun atau 15 juta unit dalam lima tahun ke depan, lanjut Hashim, bertujuan tak hanya memberikan kebutuhan hunian bagi masyarakat, tetapi juga untuk menggerakkan perke-

konomian pendapatan negara setidaknya pada triwulan kedua atau triwulan ketiga tahun depan.

Selain memungut pajak dari pengusaha nakal dan mendapat tambahan dana dari penjualan kredit karbon, Hashim mengatakan, ada satu cara lagi menambah pendapatan negara. Menurut dia, Wakil Menteri Keuangan Anggito Alimanyu mengupayakan peninjauan anggaran negara dari pengawasan dan pemantauan aktivitas internet.

Menurut perhitungan timnya, negara akan mendapatkan tambahan anggaran dari penguatan aktivitas internet yang legal, semipal, dan penguatan yang ada. Adanya inilah bisa mencapai Rp 300 triliun setiap tahun. Ini pun belum masuk dalam anggaran APBN.

"Dengan demikian, akan ada tambahan dana yang bisa diinjeksikan ke APBN sebesar Rp 440 triliun-Rp 660 triliun, atau

## Kepiting Alam di Peraliran Berakit Bintang



Seorang nelayan memperlihatkan kepiting hidup yang ditampung sementara di keramba di Desa Berakit, Teluk Sebang, Kabupaten Nelayan, Kepulauan Riau, Rabu (23/10/2024). Kepiting basil tangkapan nelayan setempat ini dijual ke rumah makan bogas bahari sekitar dengan harga jual Rp 40000 hingga Rp 140000 per kilogram tergantung jenis dan ukurannya.

## PASAR MODAL

### 2025, BEI Targetkan Nilai Transaksi Harian Rp 13,5 Triliun

**JAKARTA, KOMPAS** — Perusahaan penyelenggara pasar modal, Bursa Efek Indonesia atau BEI, menetapkan target kerja pada 2025, antara lain jumlah transaksi harian yang mencapai Rp 13,5 triliun. Mereka meniadakan strategi pertumbuhan selaras dengan proyek perbaikan kondisi ekonomi di tahun mendatang.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Heryanto mengatakan dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. RKAT 2025 antara lain membuat asumsi yang didasarkan pada kondisi makro, kebijakan ekonomi pemerintah baru, serta potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal.

"Asumsi ini berdasarkan adanya tren penurunan inflasi dan suku bunga global, di mana The Fed telah menurunkan suku bunga 50 basis poin, dan diharapkan pada tahun depan akan menurunkan lagi. Yang kedua adalah terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintahan baru, di mana target GDP (gross domestic product) nya adalah 8 persen," ujarnya dalam acara yang diselenggarakan secara daring, Rabu (23/10/2024).

Asumsi RKAT 2025 menetapkan rata-rata nilai transaksi harian (DNTD) mencapai Rp 13,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 242 hari. Target ini lebih tinggi dari DNTD yang ditetapkan untuk 2024 senilai Rp 12,25 triliun.

Asumsi lain yang ditetapkan adalah jumlah pencatatan oleh emiten di 407 dari 340 ekor. Target ini terdiri dari 66 pencatatan efek antara lain berupa saham dan obligasi, serta pencatatan efek lainnya meliputi exchange traded fund (ETF), dana investasi real estate (DIRE),

dana investasi infrastruktur, dan efek beragun aset (ERA), serta emiten waras terstruktur. Kemudian, target investor pasar modal baru berjumlah 2 juta investor baru.

BEI secara umum menyoal 31 rencana kerja di tahun depan yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, meningkatkan perlindungan investor, penyediaan layanan data yang lebih baik, serta pengembangan teknologi dan berkolaborasi dengan OJK serta SRO terkait penyelesaian perdagangan yang efisien, cepat, akurat, wajar, dan efisien," kata Iman.

Untuk mewujudkan ini, Iman melanjutkan, pihaknya akan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi rutin melalui jaringan distribusi BEI, termasuk media sosial dan untuk menarik investor, terutama investor ritel.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yerna pada kesempatan sama menyampaikan, sampai triwulan ketiga 2024, asumsi yang mereka buat untuk tahun ini, baik itu mengenai inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, semuanya sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi global dan dalam negeri, serta politik di tahun depan akan stabil.

"Sampai dengan hari ini, target (efek 2024), sudah teralisasi 460 ekor atau naik 137 persen. Kemudian, kalau kita lihat pipeline saham, target (2024) yang 340 akan tercapai 522 (di akhir tahun), artinya naik 153 persen," tuturnya.

"Terikat dengan perkembangan target lain di tahun ini, per 18 Oktober, total jumlah investor di pasar modal Indonesia sudah mencapai 14,2 juta investor atau meningkat lebih dari 2 juta investor baru atau 16 persen dibandingkan dengan akhir tahun

## KEBIJAKAN FISKAL

### Kemenkeu Langsung di Bawah Presiden, Kebijakan Fiskal Rentan Diintervensi

**JAKARTA, KOMPAS** — Keputusan Presiden Prabowo Subianto "mengambil alih" Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berdampak luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kementerian, membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik.

Penempatan Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, Periode Tahun 2024-2029.

Dalam perintah tersebut, ada empat kementerian yang langsung berada di bawah koordinasi ketajahan kementerian koordinator, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, Prabowo memutuskan "mengambil alih" Kemkeu dalam pengawasan langsung di bawah presiden.

Kepala Ekonom Bank Permata Jonis Perdekus menilai perubahan struktur Kemkeu yang tak lagi di bawah Kemko Perekonomian tetapi di bawah pengawasan langsung Presiden membawa implikasi signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan (governance) dan potensi dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku usaha.

Di satu sisi, keputusan fi-

kal dan anggaran negara dapat dibuat lebih cepat dan tepat walita tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Itu bisa memperbaiki efisiensi tata kelola anggaran negara dan membuat pemerintah lebih cepat tanggap merespons isu ekonomi.

Namun, ada implikasi negatif yang perlu diantisipasi. Perubahan struktur ini dapat menciptakan sentralisasi kekuasaan pada satu pihak, yang bisa mengurangi checks and balances di antara institusi yang berbeda. Ini menjadi tantangan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas kebijakan fiskal dan anggaran negara.

Untuk jangka panjang, hal itu bisa memengaruhi sentimen pasar dan masa depan ekonomi Indonesia. Jika pengambilalihan keputusan fiskal yang cepat itu bisa meningkatkan implementasi kebijakan yang pro-investasi, seperti alokasi anggaran infrastruktur dan subsidi yang lebih terukur, tidak masalah.

Namun, jika terlarut terpusat, ini bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal yang lebih rentan terkena tekanan politik, yang bisa mengurangi sentimen jangka panjang. Keyakinan investor bisa turun dan memicu terjadinya capital outflow atau aliran modal keluar," ujarnya.

Ekonom Bright Institute Awali Rully menilai dalam keputusan ini terdapat, secara de facto pada praktiknya Kemkeu memang lebih sering berkoordinasi langsung dengan presiden. Sementara, koordinasi Kemkeu dengan Kemko Perekonomian bisa kurang efektif teknis.

Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir kerap terjadi pengelembangan anggaran untuk pos belanja lain-lain

yang berada di bawah pos Anggaran Besar-besaran (AB) dan Anggaran Negara (BA BUN). Pengawasan anggaran di bawah BA BUN tak memerlukan koordinasi dengan Kemko, tetapi langsung kepada Presiden.

## Perubahan besar

Kekhawatiran atas perubahan struktur koordinasi Kemkeu itu juga disertai duka internasional. Analisis Economic Intelligence Unit (EIU) untuk kawasan Asia Pasifik, Win Cheng Cheah, mengatakan, keputusan Prabowo mengubah alih pengawasan Kemkeu adalah perubahan besar dalam struktur tata kelola pemerintahan Indonesia.

Meskipun sebenarnya praktik seperti ini sudah pernah dilakukan di beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura sebagai tetangga terdekat Indonesia bahkan memiliki perdana menteri yang mengangkap sebagai menteri keuangan.

Menurut dia, skenario ideal seharusnya bisa membantu Menkeu mampu mengkoordinasi kebijakan fiskal yang sulit tetapi diperlukan, terutama di masa-masa krisis yang mendesak.

Namun, ia mengkhawatirkan, kontrol secara langsung itu bisa membuka kesempatan untuk intervensi politik yang menggerus otonomi dan kredibilitas Kementerian Keuangan.

"Hasilnya bisa mengarah pada manajemen fiskal yang salah atau level utang yang lebih tinggi. Skenario terburuk adalah kabarnya arus modal keluar dari Indonesia jika investor hilang rasa percaya pada kemampuan Pemerintah Indonesia mengelola fiskalnya," kata Cheah. (GGO)

## Berburu Lowongan dalam Bursa Kerja



Pencari kerja berburu lowongan dalam Bursa Kerja di TTC Cempaka Mas, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Acara ini digelar Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat. Total ada 1.892 lowongan kerja disediakan dalam bursa kerja tersebut. Selain untuk membantu pengangguran, bursa kerja ini juga sangat strategis untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan ini memberikan ruang dan fasilitas beritanya pencari kerja dengan tenaga kerja. Sebanyak 40 perusahaan dari berbagai jenis bidang usaha dan lembaga terlibat dalam bursa kerja tersebut. Perusahaan yang terlibat dalam bursa kerja tersebut berganti berganti di berbagai bidang, seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan, serta penyiaran mass media. Bursa kerja ini menawarkan 3.000 pencari kerja.